



BPK RI

Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat

LAPORAN: Bupati Sambas menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2020 kepada BPK RI.

Laporkan LKPD TA 2020

BUPATI Sambas H Atbah Romin Suhaili Lc MH sampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2020 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, di Pontianak, Senin (15/3).

Penyampaian LKPD 2020 Kabupaten Sambas ke BPK, Bupati Sambas didampingi Sekda Kabupaten Sambas, Inspektur dan Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas. Penyerahan tersebut bersamaan dengan LKPD Kabupaten Melawi dan Sekadau.

"Penyampaian LKPD sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tepatnya Pasal 191 ayat 2. Sesuai aturan tersebut, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir," kata Atbah.

Menurutnya, Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 ini merupakan tahun keenam bagi pemerintah daerah seluruh Indonesia menerapkan akuntansi berbasis akrual, baik sistem akuntansinya maupun penyajian laporan keuangannya.

"Penerapan laporan keuangan berbasis akrual, pemerintah daerah dapat lebih komprehensif untuk menyajikan seluruh hak, kewajiban dan kekayaan serta perubahan kekayaan, hasil operasi, serta realisasi anggaran dan sisa anggaran lebih," kata Bupati.

Kondisi pengelolaan keuangan pemerintah daerah sampai saat ini. Disampaikan Atbah, belum sempurna dan masih membutuhkan penyempurnaan, masih memerlukan arahan dan bimbingan dari Lembaga Pemeriksa Keuangan, sehingga ke depan kualitas atas pengelolaan keuangan pemerintah daerah menjadi lebih akuntabel dan diharapkan akan memperoleh opini yang lebih baik.

"Opini BPK RI atas laporan keuangan merupakan suatu cerminan dan salah satu tolok ukur atau indikator penilaian akuntabilitas pemerintah daerah," katanya. (fah)